

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2019, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan memburuk akibat sengketa perdagangan yang dipicu oleh kebijakan restriksi ekspor Jepang terhadap bahan material kimia untuk pembuatan semikonduktor yang diimpor oleh Korea Selatan. Kebijakan ini dikeluarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Korea Selatan, memicu respons tegas dari pihak Korea Selatan yang mengancam akan mengeluarkan Jepang dari status preferred trading partner. Konflik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018, yang memerintahkan beberapa perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada korban kerja paksa Jepang di masa lalu. Jepang menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa isu tersebut seharusnya sudah terselesaikan pada tahun 1965 saat kedua negara memulihkan hubungan diplomatik. Konflik ini, disertai dengan ketegangan sejarah, menghasilkan kebijakan restriksi ekspor yang merugikan kedua negara. Jepang, dengan alasan keamanan nasional dan dugaan penyalahgunaan bahan kimia, menghambat pasokan bahan material semikonduktor ke Korea Selatan. Meskipun kedua negara telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa melalui inisiatif seperti Japan-Korea Free Trade Agreement (JKFTA), tindakan unilateral Jepang dalam melanggar perjanjian tersebut memperumit dinamika hubungan kedua negara.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan yang selalu terlibat dengan konflik terutama pada masa pemerintahan Yoshihiko Noda dan Shinzo Abe. Pada masa pemerintahan Yoshihiko Noda, hubungan antara Jepang

dan Korea Selatan mengalami penurunan tajam, terutama dalam konteks permasalahan ekonomi dan diplomatik. Sengketa teritorial terkait Pulau Dokdo/Takeshima dan isu comfort women menjadi titik fokus konflik antara kedua negara. Perdana Menteri Noda memperburuk situasi dengan menekankan klaim wilayah Jepang dan mengancam tindakan balasan ekonomi terhadap Korea Selatan. Situasi semakin kompleks saat Shinzo Abe mengambil alih kepemimpinan. Meskipun mencoba menyelesaikan isu comfort women melalui kesepakatan dengan Korea Selatan, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para korban, menciptakan ketegangan lebih lanjut. Upaya pemulihan hubungan melibatkan kepentingan strategis, terutama dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara, namun perang dagang yang dimulai pada 2019 memperburuk keadaan. Kebijakan pembatasan perdagangan oleh Jepang menciptakan saling balas-membalas dengan Korea Selatan, mengancam stabilitas ekonomi dan kerja sama bilateral. Akar masalah sengketa perdagangan ini dapat ditelusuri kembali pada keputusan Mahkamah Agung Korea pada tahun 2018 terkait kompensasi finansial bagi korban kerja paksa selama masa penjajahan Jepang di Korea Selatan. Sengketa ini mencerminkan ketidaksepakatan yang mendalam, menciptakan periode sulit dalam dinamika hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

Munculnya konflik antara Korea Selatan dan Jepang terkait kompensasi bagi korban kerja paksa selama Perang Dunia II muncul setelah demokratisasi Korea Selatan pada 1980-aa. Pemerintah Korea Selatan mendukung tuntutan hukum korban, memastikan penegakan hukum efektif, dan bahkan mengusulkan pembentukan dana kompensasi bersama. Presiden Moon Jae-in menegaskan dukungannya terhadap korban, memandang penyelesaian adil sebagai kunci untuk

meningkatkan hubungan bilateral. Namun, Jepang menolak keputusan pengadilan Korea Selatan dan menekankan bahwa isu kompensasi sudah diselesaikan oleh perjanjian tahun 1965. Mereka berpendapat bahwa tindakan Korea Selatan melanggar kesepakatan bilateral dan mengancam membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Jepang menilai bahwa pembayaran sebelumnya sudah mencakup kompensasi, sementara Korea Selatan memandangnya sebagai dana selamat kemerdekaan. Kedua negara menghadapi kesulitan menemukan kesepakatan, menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral dan menggambarkan perbedaan pandangan hukum dan sejarah yang sulit untuk diatasi.

Dyadic explanation dalam hubungan antara Jepang dan Korea Selatan mengalami ketegangan politik yang terus meningkat antara kedua negara. *Dyadic explanation* menjelaskan bahwa respon disproportional terjadi dikarenakan hubungan antara kedua negara. Lebih tepatnya, *dyadic explanation* menjelaskan bagaimana reaksi berlebihan dari negara-negara dalam pasangan konflik dengan mempertimbangkan karakteristik strategis kedua negara. Pendekatan ini melibatkan analisis terperinci tentang bagaimana setiap negara bereaksi terhadap tindakan yang diambil oleh negara mitra konfliknya. Jepang dan Korea Selatan memiliki sejarah panjang yang penuh dengan ketegangan dan konflik yang masih mempengaruhi hubungan bilateral mereka hingga saat ini. Sejarah penjajahan Jepang di Korea Selatan pada awal abad ke-20 telah meninggalkan luka mendalam dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti isu pekerja paksa dan "comfort women" selama Perang Dunia II.

Ketegangan ini sering kali mencuat kembali dalam bentuk sengketa diplomatik dan ekonomi. Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Agung Korea

Selatan pada tahun 2018 yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa memicu respons ekonomi dari Jepang, termasuk pembatasan ekspor bahan-bahan penting untuk industri teknologi tinggi Korea Selatan. Pendekatan dyadik dalam menjelaskan ketegangan ini menunjukkan bagaimana sejarah dan dinamika strategis antara kedua negara menyebabkan reaksi yang sering kali tidak proporsional. Analisis dyadik ini membantu memahami bahwa respons Jepang dan Korea Selatan terhadap tindakan masing-masing sangat dipengaruhi oleh konteks strategis, sejarah konflik, dan sensitivitas politik yang unik antara kedua negara.

Selain itu, pendekatan dyadik juga mempertimbangkan bagaimana negara bersikap disproportional dikarenakan adanya tindakan strategis dari Jepang sebagai sebuah penolakan terhadap keputusan Korea Selatan. Berawal dari tuntutan Korea Selatan mengenai pembayaran kompensasi kepada korban Perang Dunia II, restriksi yang dilakukan oleh Jepang membuat Korea Selatan dirugikan dengan terhalangnya kegiatan produksi produk semikonduktor di negara mereka. Namun di sisi lain, Jepang melakukan tindakan disproportional terhadap Korea Selatan bukan tanpa alasan lain. Hal ini dikaitkan dengan tindakan strategis Jepang dalam menjaga keamanan negara mereka. Jepang menjelaskan bahwa tindakan restriksi ini dilakukan karena kekhawatiran mereka terhadap Korea Utara. Jepang mencurigai bahwa sebagian dari bahan kimia tersebut bocor ke Korea Utara dan digunakan untuk aplikasi militer di sana. Hal tersebutlah yang menyebabkan ketakutan Jepang atas penyalahgunaan bahan material semikonduktor untuk kepentingan militer sehingga mereka bertindak disproportional dengan alasan strategis untuk menjaga keamanan nasional mereka.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian yang mendalam tentang “Respon Jepang Terhadap Tuntutan Kompensasi Korban Kerja Paksa Oleh Mahkamah Agung Korea Selatan”, peneliti memberikan beberapa saran kepada calon peneliti yang berminat untuk mengembangkan penelitian dengan topik serupa. Pertama, penelitian dapat diperluas untuk meninjau kontribusi aktor non-pemerintah seperti aktivis yang mendukung korban kerja paksa atau perusahaan yang terlibat dalam tuntutan kompensasi mengingat pentingnya peran aktor non-pemerintah dalam mempengaruhi respon negara. Dalam konteks ini, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara pemerintah Jepang dan aktor non-pemerintah yang terkait dengan isu kerja paksa.

Kedua, untuk mengembangkan penelitian serupa, peneliti perlu memperhatikan sumber data atau rujukan yang relevan. Penelitian ini menekankan pentingnya data primer, dan oleh karena itu, calon peneliti disarankan untuk memanfaatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, pernyataan resmi dari perusahaan terkait, serta liputan media yang dapat memberikan wawasan tentang pandangan masyarakat dan respon pemerintah. Dengan demikian peneliti berharap penelitian “Respon Jepang Terhadap Tuntutan Kompensasi Kerja Paksa Oleh Mahkamah Agung Korea Selatan” dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa.